

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori ekonomi pembangunan diartikan sebagai kemampuan suatu perekonomian untuk mencapai kondisi yang bersifat statis dalam jangka waktu yang lama dengan menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI (*Gross National Income*). Kriteria untuk mengukur kemajuan ialah tingkat pertumbuhan perkapita (*income per capita*) atau GNI per kapita. GNI per kapita digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara dan memperbesar laju pertumbuhan output yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya (Todaro, 2006). Adapun Hudiyanto (2014) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai :

“Peningkatan produk nasional (GDP,GNP) yang disebabkan bukan saja oleh peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi melainkan karena digunakan teknologi baru. Dengan faktor produksi yang sama, karena teknologi bisa dihasilkan output yang lebih besar”.

Dalam arti lain, pembangunan sebagai salah satu bentuk perubahan sosial, dan modernisasi menjadi bentuk khusus dari pembangunan. Salah satunya dengan industrialisasi. Menurut Wirutomo, dkk, (2003) pembangunan mempunyai tujuh isu yang terdiri dari isu pertumbuhan versus industri, isu pembangunan pertanian versus industri, isu pembangunan pedesaan versus perkotaan, isu teknologi padat modal versus padat karya, isu sentralisasi versus desentralisasi, dan isu perencanaan sosial ekonomi versus perencanaan fisik.

Pertumbuhan ekonomi menurut Hudiyanto (2014) adalah : “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan produk nasional (GDP,GNP) karena ada peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu”. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi bersumber dari : jumlah penduduk, sumberdaya insani atau jumlah angkatan kerja, jumlah entrepreneur atau pengusaha yang mempunyai kemauan serta kemampuan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu, sumberdaya capital atau modal, sumberdaya alam, dan sumberdaya teknologi. Faktor-faktor tersebut secara bersama akan menentukan arah dan besaran pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into The Nature and Causes Of The Wealth Of Nations (1776)*, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan segala kegiatan ekonomi, karena sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan dan membawa ekonomi pada kondisi *full employment* serta menjamin pertumbuhan ekonomi dalam posisi stasioner (*stationer state*). Dalam kondisi ini tugas pemerintah hanya menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam pertumbuhan perekonomian.

Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo menjelaskan bahwa dalam proses pertumbuhan masih pada gabungan antara laju penduduk dan laju pertumbuhan output, hal ini tidak jauh berbeda dengan teori pertumbuhan Adam Smith. Menurut David Ricardo akumulasi modal dan kemajuan teknologi berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang berarti dapat memperlambat bekerjanya *the law dimishing returns* yang akan memperlambat

penurunan tingkat hidup yang kearah yang minimal. Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran kuantitatif yang dapat menggambarkan perkembangan perekonomian di suatu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meirer, 1989).

Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Suatu negara harus meningkatkan pendapatan perkapita masyarakatnya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses antara pemerintah dan seluruh masyarakat mengelola hasil sumber daya yang ada untuk membentuk suatu pola kemitraan demi menciptakan lapangan kerja baru dan untuk merangsang perkembangan ekonomi suatu daerah dalam Arsyad (2010). Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan ekonomi antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Oleh karena itu kerjasama dalam mengelola sumberdaya yang ada dapat dimaksimalkan untuk mengurangi pengangguran dan mengembangkan perekonomian suatu daerah. Pembangunan daerah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, investasi modal, transportasi dan

komunikasi, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, prasarana dan sarana pembangunan, komposisi industri, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, teknologi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas, dan kewirausahaan Adisasmita (2008).

Pembangunan ekonomi daerah mengacu pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembangunan industri alternatif, pembentukan institusi baru, identifikasi pasar-pasar baru, perbaikan kapasitas tenaga kerja, serta transformasi pengetahuan Adhisasmita dalam Manik (2009). Pertumbuhan ekonomi wilayah diartikan sebagai meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata yang terjadi di suatu wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan, 2005). Pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada tiap daerah mengakibatkan adanya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan daerah. Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah serta memberikan dampak yang baik terhadap landasan pembangunan suatu daerah.

Dalam mencapai pembangunan ekonomi daerah pemerintah pusat sudah mengatur didalam Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian otonomi daerah yaitu, kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki daerah

dalam mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan swakarsa yang dimiliki pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002) tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan daerah seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar sektor sehingga dapat mencapai percepatan pembangunan daerah yang tertinggal.

3. Industri

Dalam arti sempit industrialisasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat mengubah barang dasar atau barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan dalam arti luas, industri diartikan sebagai semua kegiatan manusia dalam memproduksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, dan untuk menghasilkan produksi barang atau jasa yang bernilai tinggi (Susanti, 2011). Dalam aspek ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan gabungan perusahaan-perusahaan sejenis. Kedua, industri merupakan sektor ekonomi yang didalamnya menjalankan kegiatan produktif dalam mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Arsyad, 2004). Menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, cabang industri merupakan bagian dari kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses produksi. Pembangunan ekonomi dalam sektor industri menjadi sektor pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka

semakin baik perekonomian negara tersebut, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Sektor industri pengolahan atau manufaktur merupakan faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi. Menurut Sukirno (2006), “suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bagian dari suatu barang (*assembling*)”.

Pembangunan industri manufaktur (*manufacturing industry*) menjadi prioritas Negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, karena sektor industri mampu mendorong sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa menjadi lebih baik. Secara pembentukan harga yang bersifat makro, kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dibagi menjadi dua bagian yaitu, industri penghasil barang dan industri penghasil jasa (Hasibuan, 1994). Menurut Todaro (2000) tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga mengurangi atau menghapus tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Indikator dalam peranan industri dalam perekonomian yaitu sumbangan sektor industri manufaktur (*manufacturing industry*) terhadap PDB, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri, dan sumbangan komoditi industri terhadap barang dan jasa Arsyad (2010). Maka dari itu sektor industri menjadi sektor utama atau sektor prioritas di

suatu negara karena pertumbuhan ekonomi dari sektor industri menjadi indikator dalam kemajuan negara tersebut.

4. Ekonomi Lingkungan

Ekonomi lingkungan atau ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada, dan keadaan lingkungan sekitar yang terbatas jumlahnya sehingga dapat dipertahankan penggunaannya dalam jangka panjang atau keberlanjutan. Dalam Undang-Undang PLH No. 23/1997 : “lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut fungsi atau peranan lingkungan adalah sebagai bahan mentah yang diolah untuk menghasilkan barang jadi atau langsung dikonsumsi, sebagai pengolah limbah alami, dan sumber kesenangan. Semakin meningkatnya pembangunan bagi kesejahteraan manusia maka secara perlahan sumber daya alam semakin menurun kualitas serta kuantitasnya dari waktu ke waktu. Limbah yang terlalu banyak dihasilkan dari kegiatan manusia berakibat pada menurunnya kemampuan alam untuk mengolahnya. Menurut Suparmoko (2000) “jumlah limbah yang harus ditampung melebihi daya tampung lingkungan, dan kemampuan alam menyediakan kesenangan juga semakin berkurang karena SDA dan Lingkungan telah diubah fungsinya, atau karena meningkatnya pencemaran”.

Tingginya pencemaran lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupannya. SDA yang dikelola secara terus menerus tanpa adanya perbaharuan atau perbaikan akan menurunkan tingkat kesenangan manusia pada masa yang akan datang. Maka dari itu diperlukan perbaikan atau pembaharuan terhadap SDA yang ada sehingga dapat dikelola dan digunakan dalam jangka waktu yang lama.

5. Valuasi Ekonomi

Valuasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengukur nilai moneter dalam perangkat dan pelayanan lingkungan tentang sumber daya alam (SDA) Mburu (2007). Valuasi ekonomi bertujuan untuk mengukur pertimbangan manusia dalam menentukan kesediaan untuk membayar (*willingness to pay*). Kementrian Negara dan Lingkungan Hidup dalam Soemarno (2010), mengartikan bahwa valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan sebagai : ”pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumberdaya alam sesuai dengan tujuan pemanfaatannya”. Valuasi ekonomi yang dimaksud adalah nilai ekonomi total (*total net value*), nilai perbaikan atas pencemaran atau kerusakan serta pencegahan atas pencemaran atau kerusakan. Lingkungan sebagai barang publik diartikan sebagai barang yang tidak dapat diukur secara fisik-kuantitatif sehingga sulit untuk menilainya dalam bentuk moneter atau uang, tetapi lingkungan merupakan komoditas yang banyak dibutuhkan. Metode valuasi ekonomi digunakan untuk mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proyek-proyek yang telah berjalan dan berkembang. Lingkungan memiliki manfaat fungsi ekologis yang tidak terkuantifikasi dalam perhitungan nilai lingkungan

secara menyeluruh seperti keindahan alam, kejernihan air sungai, dan udara bersih. Valuasi ekonomi dampak lingkungan juga digunakan dalam menilai seberapa penting dampak yang ditimbulkan, menentukan tingkat mitigasi, serta membandingkan alternatif dan umumnya analisis obyektif pengorbanan Lindhjem (2007). Dua metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan valuasi menggunakan fungsi permintaan (*demand approach*) dan pendekatan valuasi tidak menggunakan fungsi permintaan (*non-demand approach*).

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah menggunakan pendekatan *non-demand approach* (pendekatan non-pasar). Pendekatan ini digunakan untuk mengukur biaya dampak lingkungan sehingga dapat diketahui respon dari kebijakan yang diterapkan. Metode pendekatan non-pasar meliputi, Metode Nilai Kekayaan (*Hedonic Price Method*), Metode Biaya Perjalanan (*Travel Cost Method*), dan Metode Valuasi Kontingensi (*Contingent Valuation Method*). Metode pendekatan valuasi yang sering digunakan adalah Metode Kontingensi/*Contingent Valuation Method* (CVM) karena memiliki kemampuan mengukur nilai penggunaan (*use value*) dan nilai non penggunaan (*non use value*) dengan baik.

Menurut Yakin dalam Saptutyingsih (2013) *Contingent Valuation Method* (CVM) diartikan sebagai suatu metode teknik survei dalam memberikan pertanyaan kepada penduduk tentang nilai atau harga yang diberikan untuk komoditi yang tidak memiliki pasar seperti barang lingkungan

Contingent Valuation Method (CVM) digunakan untuk mengetahui kesediaan membayar/*willingness to pay* (WTP) dari masyarakat, dan untuk

mengetahui kesediaan menerima/*willingness to accept* (WTA) kerusakan suatu lingkungan. *Willingness to pay* diartikan sebagai besaran nilai yang dibayarkan oleh seseorang untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan. Menurut Syakya (2005), *willingness to pay* merupakan metode penilaian yang bertujuan untuk mengetahui pada level berapa seseorang mampu membayar untuk memperbaiki lingkungan jika ingin lingkungannya menjadi lebih baik. Sedangkan *willingness to accept* diartikan sebagai besaran nilai yang diterima/dibayarkan untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan adanya kemunduran kualitas lingkungan Soemarno (2010). *Willingness to Pay* (WTP) dan *Willingness to Accept* (WTA) dapat merefleksikan preferensi individu dengan baik sehingga berfungsi sebagai parameter dalam valuasi ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *willingness to pay* perbaikan kualitas air sudah cukup banyak dilakukan. Dalam penelitian-penelitian terdahulu metode yang digunakan diantaranya Metode Kontingensi/*Contingent Valuation Method* (CVM), dan Metode Biaya Hedonik/*Hedonic Price Method*. Penelitian-penelitian serupa perlu dilakukan, karena lokasi penelitian dan waktu penelitian serta variabel-variabel independen yang digunakan berbeda sehingga akan memberikan hasil yang berbeda pula.

Saptutyingsih (2007) telah melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap *Willingness To Pay* untuk Perbaikan Kualitas Air Sungai Code di Yogyakarta. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Gender, Jumlah anak, Pendapatan, Ada/Tidaknya aktivitas, Lama Tinggal

dan Kualitas Air. Pada penelitian dengan obyek warga di pinggiran sungai Code ini menunjukkan hasil bahwa variabel Gender, Jumlah anak, Pendapatan, Ada/Tidaknya aktivitas berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar untuk perbaikan kualitas air. Sedangkan variabel Lama Tinggal dan Kualitas Air tidak berpengaruh terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas air di pinggiran sungai code.

Ladiance dan Yuliana (2014), melakukan sebuah penelitian di daerah Bidaracin Jatinegara Jakarta Timur dengan judul Variabel-Variabel yang mempengaruhi Kesediaan Membayar (*Willingness to Pay*) Masyarakat untuk Memperbaiki Kualitas Air. Metode yang digunakan adalah *Contingent Valuation Method* dan di dapat hasil bahwa variabel Pendidikan, Pengetahuan, Status kepemilikan rumah dan pendapatan berpengaruh positif terhadap kesediaan membayar masyarakat untuk perbaikan kualitas air. Sementara variabel Umur, Jenis kelamin, Jumlah anggota keluarga dan sumber utama air minum tidak berpengaruh terhadap kesediaan membayar masyarakat untuk perbaikan kualitas air.

Nursusandari (2009), melakukan penelitian dengan studi kasus pada kesehatan lingkungan di kawasan industri, melalui Presepsi, Preferensi, dan *Willingnes to Pay* dengan menggunakan metode kontingent. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Jarak tempat tinggal ke lokasi industri, kondisi keramaian, kondisi kebisingan, kualitas udara, pengeluaran, status tempat tinggal, fasilitas air, kondisi air, kualitas udara, kebersihan tempat tinggal, jarak tempat tinggal ke pasar, jarak tempat tinggal ke angkutan umum, tingkat kriminalitas,

preferensi responden terhadap tempat tinggal, persepsi responden lingkungan sekitar kawasan industri, pendidikan, pendapatan, jarak tempat tinggal ke lokasi kerja. Diakhir penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa variabel pendidikan, pendapatan, pengeluaran, jarak ke lokasi industri, kondisi kebisingan, kondisi keramaian, tingkat kriminalitas, dan preferensi terhadap tempat tinggal berpengaruh positif terhadap WTP. Sedangkan variabel kualitas udara, jarak tempat tinggal ke lokasi kerja, dan persepsi terhadap lingkungan sekitar kawasan industri berpengaruh negatif terhadap WTP.

Moffat, dkk, (2011), melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesediaan membayar rumah tangga untuk memperbaiki kualitas air, penelitian ini berjudul *Households Willingness to Pay for Improved Water Quality and Reliability of Supply in Chobe Ward, Maun*. Penelitian dengan menggunakan variabel Pendidikan, Pengeluaran, Pendapatan Rumah Tangga, Usia, Jenis Kelamin memperoleh sebuah hasil bahwa variabel Pendapatan rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan usia berpengaruh signifikan terhadap *willingness to pay*. Sementara untuk variabel pendidikan, pengeluaran, dan jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap *willingness to pay*.

Orgill, dkk, (2013), menggunakan *Contingent Value Method* melakukan penelitian di kawasan pinggiran kota Cambodian. Penelitian yang menggunakan variabel Persepsi kualitas air, pendidikan, pendapatan, dummy variabel (kotoran dalam rumah tangga), kepuasan dengan rasa dan bau air minum (saat ini) memperoleh kesimpulan Pendidikan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap *willingness to pay*. Sementara untuk persepsi kualitas air, dummy

variabel, dan kepuasan dengan rasa dan bau air minum saat ini tidak berpengaruh signifikan terhadap *willingness to pay*.

Gaviria and Martinez (2014), melakukan penelitian dengan judul Air Pollution and The Willingness to Pay Of Exposed Individuals in Downtown Medellin, Columbia. Penelitian dengan menggunakan metode kontingent menghasilkan kesimpulan bahwa variabel usia, pendapatan, memiliki gejala penyakit, dan paparan polusi berpengaruh positif terhadap *willingness to pay*.

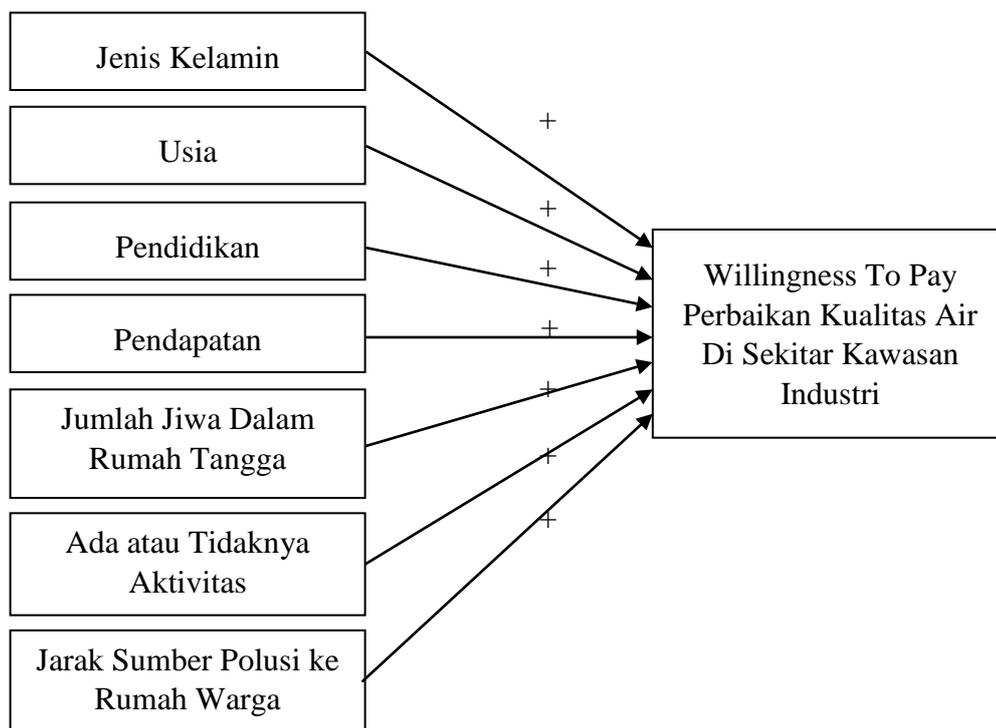
C. Kerangka Berpikir

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap pembangunan suatu negara serta kontributor utama sumber pendapatan negara untuk perekonomian sebagai modal pertumbuhan pembangunan. Peranan sektor industri dalam pembangunan dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pembangunan sektor industri yang terus mengalami pertumbuhan, menjadikan sektor industri sebagai sektor pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi Negara karena dapat mempengaruhi sektor-sektor lain menjadi berkembang.

Pembangunan industri di wilayah Bandar Lampung menjadikan sektor industri sebagai kontributor paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Industrialisasi di Bandar Lampung sebagian besar terletak di wilayah pesisir teluk Lampung. Beroperasinya industri-industri besar di kawasan pesisir, selain memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah, penyedia lapangan kerja, kegiatan industri juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kegiatan industri yang beroperasi setiap harinya menimbulkan dampak negatif

seperti, menurunnya kualitas kualitas air di sekitar kawasan industri. Adanya peningkatan jumlah industri di Bandar Lampung berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Dengan melihat dampak negatif yang di timbulkan dari kegiatan industri yang mencemari sungai, sumur warga, pantai, serta udara, mengharuskan masyarakat membayar atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan industri. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen air dengan membayar untuk biaya perbaikan kualitas air di kawasan industri, sehingga masyarakat dapat menikmati sumber daya alam secara berkelanjutan. Kualitas industri di Bandar Lampung meliputi kualitas air yang seharusnya diperbaiki sehingga memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan industri Bandar Lampung. Oleh karena itu harus ada tindakan pengkajian kesediaan membayar (*willingness to pay*) masyarakat untuk memperbaiki kualitas air di kawasan industri Bandar Lampung. Secara sistematis, kerangka berpikir dari penelitian ini dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Diagram Kerangka Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis dari penelitian *willingness to pay* terhadap perbaikan kualitas air di sekitar kawasan industri di Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Variabel jenis kelamin berpengaruh positif terhadap *willingness to pay* perbaikan kualitas air di sekitar industri Bandar Lampung.
2. Variabel usia berpengaruh positif terhadap *willingness to pay* perbaikan kualitas air di sekitar kawasan industri Bandar Lampung.
3. Variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap *willingness to pay* perbaikan kualitas air di sekitar kawasan industri Bandar Lampung.
4. Variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap *willingness to pay* perbaikan kualitas air di sekitar kawasan industri Bandar Lampung.

5. Variabel jumlah anak dalam rumah tangga berpengaruh positif terhadap *willingness to pay* perbaikan kualitas air di sekitar kawasan industri Bandar Lampung.
6. Variabel ada atau tidaknya aktivitas berpengaruh positif terhadap *willingness to pay* perbaikan kualitas air di sekitar kawasan industri Bandar Lampung.
7. Variabel jarak polusi dari industri ke rumah berpengaruh positif terhadap *willingness to pay* perbaikan kualitas air di sekitar kawasan industri Bandar Lampung.